

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI Melaksanakan demokrasi parlementer-liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat dan masa ini disebut Masa Demokrasi Liberal. Indonesia sendiri pada tahun 1950an terbagi menjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang juga bernafaskan liberal.

Secara umum, demokrasi liberal adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang berkiblat pada demokrasi. Demokrasi liberal berarti demokrasi yang liberal. Liberal disini dalam artian perwakilan atau representatif.

Dengan pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Sistem multi partai pada masa demokrasi liberal mendorong untuk lahirnya banyak partai-partai politik dengan ragam ideologi dan tujuan politik.

Demokrasi Liberal sendiri berlangsung selama hampir 9 tahun, dalam kenyataanya bahwa UUDS 1950 dengan sisten Demokrasi Liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang majemuk.

pada akhir tahun 1956, situasi tanah air ditandai dengan pelbagai macam instabilitas politik, pergolakan daerah dan gejolak didalam angkatan perang. Dan akhirnya terjadi pula kemacetan di dalam konstituante. Pergolakan-pergolakan ini

adalah akibat daripada gagalnya sistem demokrasi liberal. Partai-partai politik terus menerus saling berebut pengaruh dan berebut rezeki, tanpa memikirkan kepentingan rakyat. Mereka melakukan pelbagai tipu muslihat atau akal-akalan dalam usaha mencapai maksudnya, memenangkan kepentingan partainya., bahkan ada partai yang tidak segan-segan menjatuhkan kabinet yang perdana menteri nya anggota sendiri. Dengan demikian stabilitas politik tidak mungkin tercapai

Untuk menembus jalan buntu itu presiden Soekarno mengusulkan suatu gagasan. Gagasan Presiden ini dilontarkan oleh Presiden tanpa sepengetahuan kabinet. Presiden Soekarno, meskipun formalnya adalah Presiden konstitusional, bertindak selaku pemimpin rakyat yang prihatin karena kekacauan politik yang memuncak, sehingga bisa membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Pada tanggal 21 februari 1957, dihadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Jakarta, presiden Soekarno mengemukakan gagasannya yang kemudian terkenal sebagai **Konsepsi Presiden**, yang berkisar pada kabinet yang dinamakannya Kabinet Gotong-Royong dan dewan yang dinamakannya Dewan Nasional dibawah pimpinannya.

Pokok-pokok isi konsepsi Presiden itu adalah:

- 1) Sistem Demokrasi Parlementer secara Barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, oleh karena itu harus diganti dengan sistem Demokrasi Terpimpin
- 2) Untuk pelaksanaan sistem Demokrasi Terpimpin perlu dibentuk suatu Kabinet Gotong-Royong yang anggota-anggotanya terdiri dari semua

partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Konsepsi Presiden ini menyetengahkan pula perlunya pembentukan “Kabinet Kaki Empat” yang mengandung arti bahwa, empat partai besar, tidak hanya PNI, Masyumi dan NU melainkan juga PKI, harus turut serta didalamnya untuk menciptakan kegotong-royongan nasional.

- 3) Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan Nasional ini tugas utamanya adalah memberi nasihat kepada Kabinet, baik diminta maupun tidak diminta.

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan dekrit presiden mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950 karena dianggap tidak cocok dengan keadaan ketatanegaraan Indonesia.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain

1. Dalam upaya pengembangan materi dan pembahasan, diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai materi yang bersangkutan untuk lebih mengembangkan pembahasan dengan menambah literatur lain
2. Kepada para pembaca, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai Pengaruh Sistem Multipartai Pada Demokrasi Liberal Terhadap Stabilitas Politik Indonesia 1950-1959
3. Sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah.